

Uji Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Lailatul Hasanah

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: lailatul.22102@mhs.unesa.ac.id

Lucky Rachmawati

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: luckyrachmawati@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada pengkajian sektor ekonomi strategis sekaligus mengevaluasi eksistensi fenomena flypaper effect pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama periode enam tahun (2019–2024). Pendekatan metodologis yang digunakan dalam studi ini adalah regresi data panel, dengan memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan secara komprehensif dari kantor pengelolaan keuangan dan aset di seluruh 38 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Hasil analisis empiris mengindikasikan bahwa efek flypaper tidak muncul di Jawa Timur, yang menunjukkan respons belanja daerah yang cukup rasional terhadap sumber pendapatan. Estimasi regresi mengungkapkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengeluaran daerah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan, hal ini disebabkan oleh distribusinya yang cenderung tidak merata antarwilayah. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli demi menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: DAU, DAK, DBH, Belanja Daerah

JEL: G12, I11

Abstract

This study focuses on examining strategic economic sectors while simultaneously evaluating the existence of the flypaper effect phenomenon at the regency and city levels in East Java Province over a six-year period (2019–2024). The methodological approach employed in this study is panel data regression, utilizing secondary data comprehensively collected from financial and asset management offices across all 38 regencies and cities in the province. The results of the empirical analysis indicate that the flypaper effect does not occur in East Java, suggesting a rational regional spending response to revenue sources. Regression estimates reveal that Locally-Generated Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) partially exert a positive and significant influence on regional expenditure. Meanwhile, the Revenue Sharing Fund (DBH) was found to have no significant influence due to its uneven distribution across regions. These findings imply the importance of local governments strengthening fiscal independence through the optimization of local revenue to ensure sustainable economic development.

How to cite: Hasanah, L & Rachmawati, L. (2026). Uji Flypaper Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal Of Economics*, 6(1), 155-177.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Government Expenditure*

JEL: *G12, I11*

PENDAHULUAN

Setelah gerakan reformasi 1998 menggulingkan rezim sentralistik Orde Baru, Indonesia memasuki era baru dalam sistem ketatanegaraan. Sejak 2001, model pemerintahan bergeser dari sentralistik menuju desentralistik melalui pelaksanaan otonomi daerah, daerah-daerah menerima sejumlah kewenangan politik serta dana dikelola dan diberikan oleh pemerintahan pusat. agar bisa mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Pasaribu, 2022). Proses dimulai dengan pengesahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang penyetaraan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan fiskal daerah yang terus berkembang.

Menurut Setiaji dan Adi (2007) dalam (Indonesia, 2021) Penerapan Kebijakan otonomi daerah menciptakan keleluasaan yang signifikan bagi setiap daerah untuk memperbaiki kinerja keuangan secara mandiri. Melalui implementasi regulasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan guna mengurus sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang dimilikinya. Sejalan dengan itu, kewenangan daerah bukan sekadar formalitas prosedural, namun juga meliputi aspek keuangan melalui desentralisasi fiskal.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara langsung melahirkan kebijakan desentralisasi fiskal karena Otonomi daerah berjalan beriringan dengan desentralisasi fiskal. Kewenangan daerah dalam mengelola pelayanan publik didukung oleh alokasi dana dari pusat sebagaimana diatur dalam regulasi tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan (Pasaribu, 2022). Pada dasarnya, desentralisasi fiskal bertujuan memberdayakan daerah agar mampu membiayai pembangunan sesuai potensi masing-masing, mengurangi ketergantungan pada pusat, serta memaksimalkan capaian dan ketepatan sasaran dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, diharapkan pemerataan pembangunan dapat dipercepat dan kesejahteraan masyarakat lebih mudah diwujudkan. (Mega Christia & Ispriyarso, 2019)

Sumber pendapatan daerah diatur dalam UU No 33/2004 tentang Penyeimbangan Fiskal serta UU No 9 Tahun 2015 terkait Administrasi Daerah. Sumber daya di daerah sendiri (PAD), pembayaran penyeimbangan, dan pendapatan sah lainnya membentuk pendapatan ini. Dari ketiga sumber tersebut, PAD menjadi faktor krusial sebab mencerminkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan sendiri. Ketentuan tersebut kemudian disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD) mengklasifikasikan pendapatan daerah menjadi PAD, TKD, dan berbagai jenis pendapatan sah lainnya, yang memberikan kejelasan mengenai komposisi pendapatan dalam konteks pelaksanaan otonomi fiskal.

Untuk menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas menopang operasi administrasi pemerintahan, pembangunan daerah, dan fungsi sosial yang merupakan otoritas yang dimilikinya. Ini menunjukkan yang mengharuskan pemerintah daerah agar memiliki kemampuan dalam upaya meningkatkan PAD dianggap sebagai ukuran keberhasilan dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah (Fitriani et al., 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Halim (2007) dalam (Primahadi & Kurniawan, 2021) derajat kemandirian fiskal ditunjukkan oleh kapasitas pemerintah daerah guna mendanai semua urusan pemerintahan, pengembangan, dan penyediaan jasa publik dengan bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Ini mencerminkan PAD adalah tolok ukur utama kemandirian fiskal daerah. Kondisi tersebut dipertegas oleh Kuncoro (2004:8) dalam (Nasir, 2019) salah satu indikator desentralisasi fiskal adalah perbandingan kontribusi PAD dalam keseluruhan pendapatan daerah, sehingga Tingkat kemandirian keuangan suatu negara lebih besar semakin mandiri suatu daerah.

Namun demikian, PAD bukan satu-satunya sumber pendanaan daerah. Di sisi lain, terdapat Dana Transfer yang didanai oleh anggaran negara dan dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus meminimalisir disparitas fiskal, baik antar daerah maupun pusat-daerah (Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Dana ini meliputi DBH, DAU, DAK, DD merujuk pada pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 (Indonesia, 2022). Penerapan Transfer ke Daerah (TKD) bertujuan terutama untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di tingkat daerah, memperkecil disparitas fiskal antar daerah, mendukung pendanaan pelaksanaan urusan pemerintah oleh daerah, serta menjaga keberlanjutan fiskal secara nasional. Selain itu, TKD juga diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah melalui skema transfer yang lebih sederhana dan berbasis kinerja. (Indonesia, 2022)

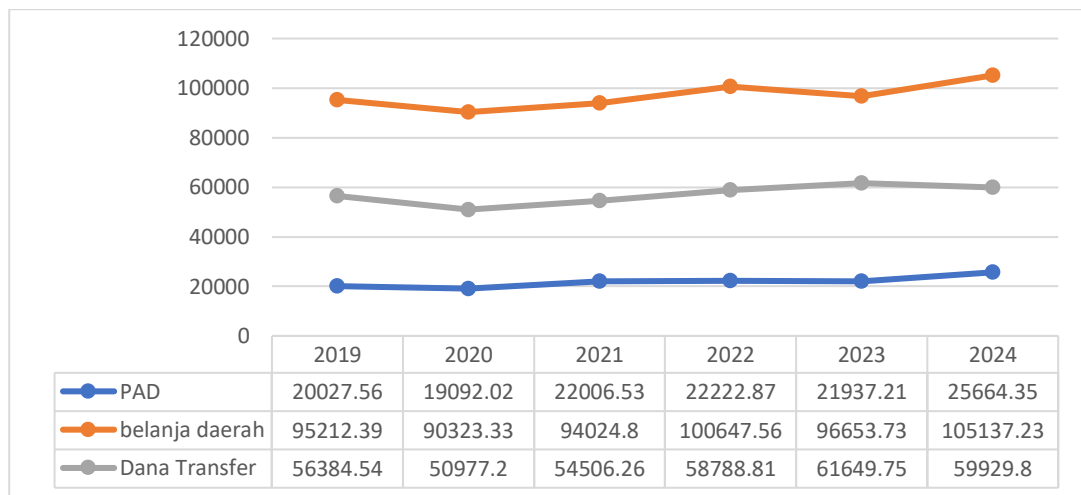
Sejalan dengan tujuan tersebut, efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dapat pula dilihat dari kinerja ekonomi wilayah. Instrumen utama untuk menilai mencerminkan hal itu ialah kontribusi PDRB, di mana Pulau Jawa secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional, yakni sekitar 57% pada tahun 2024 yang ditinjau dari rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan BPS pada akhir tahun 2024 sejumlah 4,92%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas ekonomi Indonesia selama beberapa decade terakhir ini. Belanja daerah di Provinsi-provinsi Pulau Jawa menunjukkan kecenderungan yang menunjukkan tingkat tinggi serta mengalami peningkatan secara berkelanjutan setiap tahunnya, mencerminkan besarnya tanggung jawab finansial lokal untuk membantu kemajuan wilayah serta penyediaan jasa umum.

Berdasarkan data APBD Provinsi, belanja daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan dalam total belanja daerah selama periode 2020-2024 Usai terjadinya perlambatan ekonomi pada tahun 2020 sebagai konsekuensi dari dampak pandemic covid-19, total belanja daerah kembali meningkat secara konsisten hingga mencapai 142,28 triliun pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat belanja terbesar di Pulau Jawa, sejajar dengan Jawa Barat. Menariknya peningkatan belanja daerah tersebut tidak diiringi oleh peningkatan proposional dalam penerimaan dana transfer.

Besarnya kontribusi ekonomi Pulau Jawa tidak selalu sejalan dengan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di dalamnya. Di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur menempati posisi penting karena secara konsisten menjadi penerima Dana Tranfer terbesar di Pulau Jawa selama Lima tahun terakhir ini.

Besaran pendapatn transfer Jawa Timur menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional seiring dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menata ulang sistem pendapatan daerah, termasuk mekanisme pembagian hasil dan pengelolaan kewajiban. Hal ini menandakan adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional.

Kenaikan belanja di tengah penurunan Dana Transfer ini secara langsung mengindikasikan adanya tekanan fiskal yang memaksa pemerintah daerah mencari sumber pendanaan lain, termasuk penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat direferensikan melalui tabel berikut:



Gambar 1. Tren Penerimaan PAD dan Dana Transfer

Sumber: DJPK, 2025 (Telah diolah)

Secara agregat, PAD Jawa Timur berhasil menunjukkan tren peningkatan dari 2020 hingga 2024, Jawa Timur mengalami kenaikan 39,34 triliun menjadi 49,83 triliun atau tumbuh sekitar 26,66% dalam waktu lima tahun. Meskipun PAD menunjukkan tren peningkatan yang positif, data rasio PAD terhadap Belanja Daerah mengonfirmasi bahwa mayoritas sekitar 63% atau 24 dari 38 kabupaten atau kota masih terperangkap dalam kategori rendah. Peningkatan agregat PAD Provinsi Jawa Timur menutupi realitas fiskal yang rentan di tingkat daerah, yang menggambarkan mayoritas kabupaten dan kota masih memiliki tingkat rasio PAD terhadap belanja daerah yang terbatas, menunjukkan dominasi sumber pendanaan dari struktural yang tinggi pada transfer pusat untuk membiayai pengeluaran mereka, hal ini memperkuat hipotesis adanya Flypaper Effect .

Tabel 1. Rasio PAD terhadap Belanja Daerah

Rasio	2019	2020	2021	2022	2021	2024
<10%	1	0	1	1	0	0
10% - 19%	27	26	21	24	24	24
20-30%	6	10	10	9	11	11
>30%	4	2	6	4	3	3

Sumber: DJPK, 2025 (Telah diolah)

Memasuki periode 2022 sampai 2025 Provinsi Jawa Timur menghadapi guncangan fiskal yang signifikan, tepat di masa transisi menuju implementasi penuh UU No 1/2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Perubahan ini menghantarkan dampak mendalam pada struktur finansial lokal, terutama melalui reformulasi mekanisme dana transfer dan penerapan skema opsen pajak yang secara otomatis dapat memengaruhi komposisi PAD. Maka periode 2019-2024 menjadi fase kritis untuk mengamati bagaimana pemerintah daerah menyesuaikan pola pengelolaan fiskalnya sebelum system baru diberlakukan secara penuh pada tahun 2025.

Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian didasarkan pada urgensi fiskal yang kuat sebagaimana ditunjukkan dalam hasil analisis Laporan Perekonomian dan Fiskal Daerah (LPEFD) DJPK Tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Jawa Timur diklasifikasikan ke dalam Kuadran II pada peta tipologi Stimulus Transfer ke Daerah (TKD) dan Resiliensi Fiskal Daerah, yang berarti memiliki elastisitas stimulus TKD rendah namun tingkat resiliensi fiskal tinggi. Klasifikasi ini mengindikasikan bahwa meskipun Jawa Timur merupakan daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif kuat dan ketahanan ekonomi yang baik terhadap guncangan eksternal, stimulus fiskal melalui TKD justru kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kinerja belanja daerah. kondisi ini membuka dugaan adanya flypaper effect, dengan kondisi belanja daerah yang cenderung lebih tergantung pada dana transfer yang diterima dibandingkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga dana TKD cenderung terserap yang digunakan terutama untuk mendanai belanja operasional dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah (Keuangan, 2025).

Urgensi penelitian ini semakin meningkat dengan adanya kebijakan rasionalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026, yang mengindikasikan akan terjadi pemangkasan transfer fiskal dari pusat ke daerah. Berdasarkan dokumen RPD Jawa Timur 2025-2026, total dana transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan menurun secara signifikan mulai tahun 2025. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini untuk menilai apakah perilaku belanja pemerintah daerah selama 2019–2024 menunjukkan gejala flypaper effect, yakni kondisi ketika Pembayaran transfer memengaruhi pengeluaran daerah lebih banyak daripada pendapatan mereka sendiri.

Jika flypaper effect benar terjadi, maka tujuan peningkatan kemandirian fiskal yang menjadi fondasi utama dalam RPJPD 2025–2045 dapat terancam, dan ruang fiskal untuk pembangunan produktif akan semakin terbatas. Jika fenomena ini berkelanjutan, maka akan melemahkan semangat Akibatnya, kapasitas fiskal daerah

menjadi terbatas dan arah pembangunan jangka panjang berbasis potensi lokal tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan munculnya flypaper effect menandakan bahwa perluasan belanja pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh volume pendapatan transfer daripada kapasitas dalam menggali sumber pendapatan sendiri, yang diukur melalui melalui DAU, DAK relatif terhadap memanfaatkan PAD (Somantri, 2024). Padahal, PAD seharusnya dijadikan sebagai parameter penilaian utama implementasi kebijakan desentralisasi.

Berbagai studi terdahulu menunjukkan adanya fenomena ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan. Kajian terkait pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah, sekaligus indikasi flypaper effect, telah dibahas dalam literatur baik di tingkat nasional maupun internasional menganalisis Kemandirian fiskal daerah dan efek perangkap lalat dengan variabel DAU, PAD, serta moderasi upaya pajak di Provinsi Bali. Hasilnya mengindikasikan DAU dan PAD mempengaruhi pengeluaran modal, dengan fenomena flypaper effect ketika DAU berdampak lebih besar daripada PAD (Ayu et al., 2024). Selain itu, upaya pajak sebagai variabel moderasi terbukti memperkuat kemandirian fiskal daerah. Naraswari Wira & Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, (2023) menelaah pengaruh DAK, PAD, dan SILPA mengenai pengeluaran pemerintah daerah Indonesia pada rentang waktu 2019–2021. Temuan menunjukkan ketiga aspek tersebut pengaruhnya positif nyata pada pengeluaran daerah. Akan tetapi, tidak seperti kajian lain, studi ini tidak menyingkap adanya fenomena perangkap lalat, yang menunjukkan bahwa respon belanja daerah terhadap PAD relatif seimbang dengan respon terhadap transfer pusat.

Penelitian selanjutnya dengan dua provinsi, Jawa Timur dan Jawa Barat, menggunakan variabel PAD, DAU, DAK, DBH, serta variabel kontrol PDRB. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan antar wilayah: di Jawa Timur, DAK tidak berpengaruh signifikan, sementara DAU, PAD dan PDRB sangat memengaruhi pengeluaran daerah di Jawa Barat, semua variabel berpengaruh signifikan (Somantri, 2024). Fenomena flypaper effect tetap ditemukan di kedua provinsi, memperlihatkan bahwa ketergantungan pada transfer pusat masih kuat. Astari et al., (2025) melaporkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah, baik PAD maupun DAU berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan belanja daerah. Daerah dengan PAD rendah melihat dampak flypaper lebih besar yang mengonfirmasi bahwa tingkat dependensi fiskal daerah terhadap transfer pusat tetap substansial.

Penelitian selanjutnya meneliti flypaper effect serta opsi-opsi fiskal yang dapat dipilih oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, dengan menggunakan indikator PAD per kapita, belanja daerah per kapita, unconditional grant (gabungan DAU dan DBH), dan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKFD) (Pramudya & Anis, 2024). Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun PAD merupakan sumber utama pendapatan, pendanaan daerah tetap mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Fenomena itu ditemukan kuat, menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah belum optimal. Di Provinsi NTT meneliti pengaruh DBH, DAK, dan PAD pada pengeluaran lokal. Temuan mengindikasikan jika pengeluaran regional dipengaruhi secara signifikan oleh setiap variabel. Fenomena flypaper effect juga ditemukan, karena dana transfer lebih dominan dibanding PAD. Penelitian ini menggunakan dua model analisis yang memperkuat validitas hasil, meskipun lingkupnya terbatas pada NTT (Lani et al., 2024). Pendekatan teori federalisme fiskal mengungkapkan bahwa transfer

pembayaran pusat seperti DAU berperan penting dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah (local government expenditure). Selain itu, hasil studi ini menandakan adanya flypaper effect, di mana belanja daerah lebih cepat meningkat ketika menerima dana dari pusat dibandingkan melalui PAD (Wati et al., 2022).

Sejalan dengan temuan ini, studi oleh Wibowo & Widodo, (2023) menunjukkan bahwa transfer pemerataan dan penerimaan pajak daerah (PAD) terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran daerah, dengan dana perimbangan cenderung memiliki peran lebih besar, yang menunjukkan adanya flypaper effect. Temuan di Provinsi Aceh juga sejalan, di mana DAU dan PAD memengaruhi pengeluaran daerah secara signifikan, dengan kontribusi DAU lebih tinggi dibanding PAD (Yani Rizal et al., 2021). Penelitian oleh Firda Armatas Solicha, (2024) mengevaluasi *Flypaper Effect* terhadap pengeluaran daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode 2017–2023. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa PAD dan DAK berperan penting dalam mendorong peningkatan belanja daerah, sedangkan DAU terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan jika di Nusa Tenggara Timur, flypaper effect tidak ditemukan karena koefisien pengaruh PAD lebih dominan dibandingkan dana transfer, yang menyiratkan bahwa kebijakan belanja daerah lebih didorong oleh kemampuan pendapatan sendiri (kemandirian) daripada berdasarkan anggaran pengiriman umum yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penelitian di Jawa Tengah dan Jawa Barat (2011–2013) menunjukkan bahwa PAD dan DAU mempengaruhi pengeluaran regional secara signifikan, meskipun data yang digunakan relatif lama. di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2020–2021 justru menemukan bahwa hanya DAU yang memiliki efek positif yang signifikan, sedangkan PAD, DAK, dan DBH tidak (Suryani, 2018). Fenomena ini mengindikasikan adanya flypaper effect, karena pengeluaran pemerintah daerah cenderung lebih dipengaruhi oleh aliran transfer dari pusat dibandingkan oleh pendapatan pajak daerah (Fitriani et al., 2024). Sementara itu, kajian oleh Dewi, (2017) yang menelaah distrik dan kota di Indonesia menemukan bahwa PAD dan DAU memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK memiliki dampak positif yang tidak signifikan. DAU terbukti memiliki peran paling dominan, yang semakin memperkuat bukti keberadaan flypaper effect.

Selain penelitian pada level provinsi/kabupaten, studi mengenai daerah otonom baru di Indonesia periode 1999–2021 oleh (Tanjung et al., 2021) menggunakan model regresi data panel (PLS, FEM, REM) memperlihatkan keberadaan flypaper effect, di mana pengeluaran regional merespons DAU lebih banyak daripada PAD. Hasil pengujian menegaskan bahwa Pengeluaran pemerintah daerah lebih terpengaruh oleh aliran pembayaran dari pusat dibandingkan dengan penerimaan dari daerah itu sendiri. Penelitian ini juga merekomendasikan regresi data panel sebagai metode tepat untuk menganalisis flypaper effect di Indonesia.

Dalam lingkup internasional, di Tanzania oleh (Masaki, 2018) memberikan perspektif berbeda. Studi ini menunjukkan bahwa transfer antarpemerintah justru mendorong peningkatan pendapatan lokal, terutama di daerah pedesaan dengan kapasitas fiskal

lemah. Transfer berfungsi sebagai fasilitator mobilisasi pendapatan melalui pembiayaan layanan publik, penegakan pajak, serta stimulus ekonomi lokal. Temuan ini bertentangan dengan banyak penelitian di Indonesia yang cenderung menemukan flypaper effect, sehingga menekankan bahwa perbedaan konteks kelembagaan dan kapasitas fiskal dapat menghasilkan dinamika yang berbeda.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa fenomena flypaper effect masih banyak ditemukan di Indonesia, dalam kondisi belanja daerah yang lebih sensitif terhadap dana transfer pusat dibandingkan pendapatan pajak daerah. Namun, terdapat variasi hasil antar wilayah maupun periode waktu, serta temuan internasional yang menunjukkan pola berbeda. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian lebih lanjut, termasuk pada konteks Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024, untuk memperkuat pemahaman mengenai peran PAD, DAU, DAK, dan DBH dalam memengaruhi belanja daerah dengan adanya indikasi flypaper effect.

Dengan mempelajari secara mendalam dampak PAD, DAU, dan DAK terhadap pengeluaran daerah, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan efisien. Pendekatan ini penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang mandiri, berkelanjutan, dan berfokus pada potensi unggulan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memperluas wawasan ilmiah, baik dari perspektif teoritis maupun praktis, khususnya dalam penguatan manajemen keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

Teori yang digunakan yaitu Teori Federalisme fiskal Musgrave (1959) memulainya, dan Oates (1972) memperluasnya dalam bukunya Fiscal Federalism. Teori ini menjelaskan pendelegasian wewenang dari pusat guna mengoptimalkan kesejahteraan. Pemerintahan sentral berperan menjaga stabilisasi makroekonomi, redistribusi pendapatan, serta penyediaan barang publik nasional, sedangkan pemerintah daerah lebih relevan untuk penyelenggaraan layanan umum dan penyediaan fasilitas publik lokal yang manfaatnya terbatas di wilayahnya. (Oates, 1999)

Salah satu instrumen utama dalam federalisme fiskal adalah adanya intergovernmental transfers atau transfer antar-pemerintah. Dalam praktiknya, bentuk transfer dapat berupa unconditional grants (DAU, DBH) yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam penggunaannya, maupun conditional grants (DAK) yang ditujukan untuk membiayai fungsi tertentu sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.

Kebutuhan akan transfer ini muncul karena kapasitas own source revenues atau penerimaan asli daerah umumnya tidak memadai guna membiayai keseluruhan belanja daerah. Dengan kata lain, meskipun own source revenues tetap memegang peranan krusial bagi keuangan daerah, keterbatasan kapasitas fiskal lokal membuat transfer dari pemerintah pusat menjadi mekanisme yang tidak terpisahkan dalam sistem federalisme fiskal (Oates, 1999)

Transfer ini juga berfungsi untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal, yaitu perbedaan antara tanggung jawab belanja yang dilimpahkan kepada pemerintah

daerah dengan kapasitas penerimaan yang dimiliki. Selain itu, transfer memiliki peran penting guna meminimalisir kesenjangan fiskal horizontal antar daerah yang memiliki kapasitas fiskal berbeda. Dengan demikian, mekanisme transfer tidak hanya menutup kekurangan fiskal daerah, tetapi juga menjaga pemerataan antarwilayah.

Kendati demikian, teori federalisme fiskal tidak lepas dari kelemahan. Perbedaan kapasitas fiskal antar daerah sering kali menimbulkan kesenjangan fiskal yang cukup besar. Banyak daerah juga masih mengalami dominasi yang kuat dari dana transfer, sehingga kemandirian fiskal sulit terwujud. Kondisi ini dapat memunculkan Flypaper effect terjadi ketika pengeluaran daerah lebih terpengaruh oleh dana transfer pusat daripada oleh pendapatan asli daerah (Turnbull, 1998; Oates, 1999). Dengan kata lain, tujuan awal federalisme fiskal untuk mendorong kemandirian dan efisiensi belum sepenuhnya tercapai dalam praktiknya.

Dalam perkembangannya, teori federalisme fiskal memunculkan prinsip desentralisasi fiskal, yaitu pemindahan otoritas fiskal dari pusat ke daerah, menyebabkan pengelolaan keuangan lebih dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Oates (1999) Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kebebasan untuk lebih tanggap dalam memberikan pelayanan publik, berkat pemahaman yang optimal terhadap aspirasi warga.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan melalui otonomi daerah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 mengenai pembagian keuangan pusat-daerah. Implementasinya menggunakan instrumen keuangan daerah berupa PAD dan dana transfer dari pusat, termasuk DAU, DAK, dan DBH.

Dengan demikian, teori Federalisme Fiskal menjadi dasar konseptual, sementara desentralisasi fiskal menjadi bentuk implementasi nyata dalam sistem keuangan daerah Indonesia. Keduanya relevan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan efek PAD dan transfer dana dari pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH, terhadap belanja pemerintah daerah. Fenomena flypaper effect yang diteliti merupakan konsekuensi empiris dari penerapan federalisme fiskal, di mana ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat masih melebihi usaha peningkatan PAD. Karena itu, teori federalisme fiskal memperkuat landasan teori terkait interaksi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memberikan legitimasi akademik yang sesuai bagi studi ini.

METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk mengidentifikasi serta menganalisis dampak DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap Belanja Daerah, baik pengaruh per variabel maupun gabungan secara keseluruhan. Kajian ini mengandalkan data panel yang mencakup 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019 sampai 2024. Data sekunder diperoleh melalui portal resmi DJPK Kementerian Keuangan serta BPK RI.

Data panel memungkinkan penggabungan dua jenis informasi yang tersusun atas dua dimensi data, yakni dimensi antar entitas yang menangkap perbedaan karakteristik masing-masing subjek serta dimensi temporal yang merekam perkembangan suatu subjek sepanjang periode pengamatan. Ketika kedua jenis data ini digabungkan

jumlah observasi meningkat secara signifikan tanpa memerlukan perlakuan khusus terhadap data. Penggabungan tersebut juga mampu memperbaiki kualitas dan memperkaya informasi penelitian. (Gujarati, 2009)

$$\ln_{BD_{it}} = \alpha_i + \beta_1 \ln_{DAU_{it}} + \beta_2 \ln_{DAK_{it}} + \beta_3 \ln_{DBH_{it}} + \beta_4 \ln_{PAD_{it}} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Di mana :

- BD : Belanja Daerah
DAU : Dana Alokasi Umum
DAK : Dana Alokasi Khusus
DBH : Dana Bagi Hasil
PAD : Pendapatan Asli Daerah
i : Cross Section (Kabupaten/Kota)
 α : Konstanta
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien pada masing-masing variabel bebas
 ε : error term

Kriteria model diuji menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model memenuhi karakteristik statistik yang diperlukan. Untuk memperoleh hasil analisis, dilakukan pengujian statistik berupa Uji simultan (F), Uji parsial (t), dan Uji koefisien determinasi (Basuki, 2021)

Penentuan Model Estimasi Data Panel

Analisis data dilakukan menggunakan metode efek umum, efek tetap, dan efek acak, dengan Uji Chow dan Hausman digunakan untuk menguji kelayakan model.

Uji Chow

(Basuki, 2021:60) menjelaskan bahwa Uji Chow digunakan untuk menguji apakah intersep dari seluruh unit cross section adalah sama.

Hipotesisnya adalah:

- H0 : Semua intersep sama (Pooled OLS dipilih)
H1 : Ada perbedaan intersep antar unit (Fixed Effect)

Berdasarkan kriteria berikut:

Apabila nilai $p < 0,05$, H0 ditolak dan model Efek Tetap (Fixed Effect) digunakan.

Apabila nilai $p > 0,05$, H1 ditolak dan model Pooled OLS dipilih

Uji Hausman

Setelah H1 diterima dalam Uji Chow dan model efek tetap digunakan, Uji Hausman dilakukan. Uji ini digunakan untuk menegaskan apakah model yang benar adalah efek tetap atau efek acak.

Hipotesisnya adalah:

H0 = Efek individual dan variabel independen tidak berkorelasi (gunakan REM)

H1 = Ada korelasi (gunakan FEM)

Kriteria keputusan:

Saat p-value < 0,05, H0 dianggap tidak diterima (model fixed effect)

Saat p-value > 0,05, hipotesis H1 ditolak (random effect)

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Dalam menguji multikolinearitas, R² dari regresi parsial tiap variabel independen dibandingkan dengan koefisien determinasi model utama. Apabila R² model utama lebih besar, ditarik kesimpulan multikolinearitas tidak terjadi. Selain itu, pemeriksaan juga dapat dicapai dengan matriks korelasi, di mana model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila koefisien korelasi antarsesama variabel bebas berada di bawah 0,85. (Basuki, 2021:62)

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas teridentifikasi apabila sebaran galat (error) tidak sama antar data, sehingga hasil perhitungan jadi kurang akurat. Kondisi ini tidak mengubah nilai koefisien, akan tetapi kondisi ini membuat hasil pengujian, termasuk t-test dan F-test, menjadi tidak valid karena standar error-nya tidak stabil. Deteksi Uji Glejser dan White dapat digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas.

Kriteria keputusan :

H0 : Model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas

H1 : Model mengalami heteroskedastisitas

Ketika p-value > 0,05, H0 diterima

Ketika p-value < 0,05, H0 ditolak

Goodness Of Fit

Uji t (Uji Parsial)

Pengujian t bertujuan untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan penerimaan hipotesis ditetapkan berdasarkan nilai signifikansi. Apabila Sig. t < 0,05, pengaruh variabel independen dianggap signifikan.

Uji F (Uji Simultan)

Simultan testing atau Uji F dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi standar Goodness of Fit. Uji ini digunakan untuk menilai apakah pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen terjadi secara signifikan bersama-sama. Model dianggap valid dan hipotesis diterima apabila Sig. F = 0,05.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, yang biasa disebut R^2 , berfungsi untuk menilai tingkat kemampuan model dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Nilainya berkisar antara nol hingga satu. Nilai R^2 kecil berarti variabel bebas hanya dapat menjelaskan sebagian kecil variasi variabel terikat. Sebaliknya, nilai R^2 tinggi (mendekati 1) menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang baik dan variabel independen efektif dalam menjelaskan variabel dependen. R^2 yang rendah mengindikasikan kemampuan model sangat terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Penentuan Model Estimasi Data Panel

Tujuan pengujian ini adalah menentukan apakah Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan untuk regresi yang diteliti. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai cross-section sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga Fixed Effect Model dipilih. Untuk menilai model terbaik, dilakukan Uji Hausman antara efek tetap dan efek acak, yang menghasilkan bahwa efek tetap lebih sesuai, dengan nilai keacakan lintas bagian $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, kedua uji tersebut menegaskan bahwa model efek tetap adalah pilihan terbaik, dan pengujian *Lagrange Multiplier* tidak diperlukan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas sangat penting dilakukan dalam data panel yang dimaksudkan guna menentukan keberadaan korelasi antarvariabel bebas yang berpotensi menimbulkan distorsi terhadap hasil estimasi keakuratan estimasi parameter. Tingkat multikolinieritas yang tinggi dapat menyebabkan variabel independen kehilangan kontribusi uniknya terhadap variabel dependen. Multikolinieritas dapat diidentifikasi melalui pengujian korelasi antara variabel-variabel independen.

Hasil Data korelasi antara DAU dan DAK adalah 0,579516, korelasi antara DAU dan DBH adalah 0,059709, dan korelasi antara DAU dan PAD adalah 0,348720. Selain itu, korelasi antara DAK dan DBH adalah 0,097598, korelasi antara DAK dan PAD adalah 0,334751, dan korelasi antara DBH dan PAD adalah 0,185467. Karena nilai korelasi antarvariabel independen tidak mencapai 0,80, hubungan signifikan antar variabel tersebut tidak terdeteksi. Konsisten dengan hasil ini, model regresi panel ini tidak menunjukkan multikolinieritas; dengan demikian, setiap variabel independen dapat dievaluasi.

Uji Heteroskedastisitas

Merujuk pada pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan metode Glejser Merujuk dalam hasil estimasi yang telah dilakukan, variabel independen tidak memberikan dampak nyata secara statistik pada nilai mutlak residual (*absolute residual*). Kondisi ini tercermin dari nilai probabilitas (Prob.) nilai setiap variabel

yang melampaui sig. 0,05. Rincian nilai probabilitas menunjukkan DAU 0,1234, DAK 0,3445, DBH 0,3674, dan PAD 0,8338. Karena masing-masing nilai lebih besar dari 0,05 ($> 0,05$), H_0 diterima. Keseluruhan hasil uji menunjukkan bahwa model regresi ini kemungkinan homoskedastik dan sesuai dengan asumsi klasik, karena tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Data Panel Menggunakan Pendekatan Fix Effect Model

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.946228	0.789675	4.997281	0.0000
DAU	0.229675	0.114614	2.003896	0.0465
DAK	0.118125	0.037876	3.118694	0.0021
DBH	0.030028	0.018680	1.607493	0.1096
PAD	0.232525	0.032200	7.221364	0.0000
R-squared	0.983305	Mean dependent var		7.713319
Adjusted R-squared	0.979625	S.D. dependent var		0.508735
S.E. of regression	0.072618	Akaike info criterion		-2.242385
Sum squared resid	0.980849	Schwarz criterion		-1.610663
Log likelihood	297.6318	Hannan-Quinn criter.		-1.987504
F-statistic	267.1929	Durbin-Watson stat		1.958631
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olah data Eviews 13

Hasil estimasi regresi menggunakan Model Efek Tetap (FEM) yang tercantum pada Tabel 4 menunjukkan seberapa besar pengaruh DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah di kabupaten dan kota Jawa Timur. Persamaan regresi yang diperoleh dari model ini yakni

$$\begin{aligned} \ln_{BD}_{it} = & 3.946228_i + 0.229675 \ln_{DAU}_{it} + 0.118125 \ln_{DAK}_{it} \\ & + 0.030028 \ln_{DBH}_{it} + 0.232525 \ln_{PAD}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

Menurut persamaan regresi ini, analisis model dapat digambarkan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 3.946228 adalah konstanta yang mewakili besarnya Belanja Daerah jika nilai semua variabel independen sama dengan nol. Koefisien DAU tercatat 0,229675, menunjukkan bahwa peningkatan 1 unit DAU berakibat pada kenaikan 0,229% Pengeluaran Regional. DAK dengan koefisien 0,118125 menunjukkan efek kenaikan 1 unit DAK sebesar 0,118% pada Pengeluaran Regional. Sementara DBH, memiliki koefisien 0,030028, yang berarti kenaikan 1 unit DBH meningkatkan Pengeluaran Regional sebesar 0,030%.

Goodness Of Fit

Uji t (Parsial)

Uji T (Pasal) dapat disimpulkan dari hasil estimasi di Tabel 4

DAU (X1) terbukti berkontribusi signifikan terhadap pengeluaran daerah pada kabupaten dan kota Jawa Timur. Nilai t tercatat sebesar 2,003896, melampaui nilai t tabel 1,971, dengan nilai probabilitas $0,0465 < 0,05$ yang menegaskan signifikansi statistik.

DAK (X2) menunjukkan nilai t 3,118694, lebih besar dari t tabel 1,971, serta nilai probabilitas $0,0021 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, menandakan bahwa DAK (X2) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota Jawa Timur.

Variabel DBH (X3) diduga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengeluaran daerah di kabupaten/kota Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t 1,607493 yang lebih kecil daripada t tabel, dan probabilitas $0,1096 > 0,05$. Oleh karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak.

PAD (X4) memiliki nilai t sebesar 7,221364, melebihi t tabel 1,971, dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Hasil ini menegaskan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel PAD (X4) memberikan pengaruh signifikan pada pengeluaran daerah di kabupaten/kota Jawa Timur.

Uji F (Simultan)

Hasil analisis F menunjukkan nilai 267,1929, lebih tinggi daripada F-tabel 2,37, dengan probabilitas $0,000000 < 0,05$. Akibatnya, H0 ditolak dan H1 diterima, yang membuktikan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 4, nilai R-squared 0,983305 (98,33%) mengindikasikan bahwa variabel independen DAU, DAK, DBH, dan PAD berperan dalam menjelaskan 98,33% variasi pengeluaran daerah Jawa Timur, sementara sisanya sebesar 1,67% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam studi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Merujuk pada pembuktian hipotesis (Uji t), ditemukan bahwa alokasi dana (DAU) berdampak positif nyata terhadap pengeluaran provinsi Jawa Timur. Temuan ini konsisten dengan karakter fiskal daerah di Jawa Timur yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kabupaten/kota masih bergantung pada DAU sebagai sumber pendapatan terbesar dalam struktur APBD.

Dari tren data 2019-2024 terlihat bahwa DAU relative stabil dan cenderung meningkat selama periode pengamatan, hal ini merupakan hal yang rasional jika ditinjau dari karakteristik DAU sebagai *block grant* sehingga Pemerintah daerah memegang otoritas keleluasan penuh guna mengalokasikan anggaran tersebut selaras dengan kebutuhan, peningkatan DAU langsung memperluas *fiscal space* lokal. Di sebagian

besar wilayah administratif kabupaten dan kota di Jawa Timur, DAU memegang peranan vital sebagai “tulang punggung” APBD, yang utamanya digunakan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, seperti Belanja Pegawai (gaji ASN) dan operasional dasar pemerintahan. Kenaikan alokasi DAU berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal daerah, memberi pemerintah daerah ruang anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran. Fakta ini berkesesuaian dengan teori Federalisme Fiskal yang menegaskan bahwa transfer antar pemerintah seperti DAU diperlukan guna meminimalisir disparitas fiskal vertical antara pusat dan daerah dikarenakan kapasitas penerimaan PAD di banyak kabupaten/kota belum mencukupi untuk membiayai seluruh urusan desentralisasi, maka transfer DAU berfungsi untuk menutup *fiscal gap* agar standar pelayanan public tetap terpenuhi. Karena DAU bersifat block grant yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar, daerah menyesuaikan pengeluaran mereka mengikuti alokasi DAU, hal tersebut menjelaskan mengapa variabel DAU menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, karena DAU bukan hanya tambahan dana melainkan fondasi utama fiskal daerah.

Temuan ini sejalan dengan teori Federalisme Fiskal yang menegaskan bahwa transfer antar pemerintah seperti DAU diperlukan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertical antara pusat dan daerah dikarenakan kapasitas penerimaan PAD di banyak kabupaten/kota belum mencukupi untuk membiayai seluruh urusan desentralisasi, maka transfer DAU berfungsi untuk menutup *fiscal gap* agar standar pelayanan public tetap terpenuhi. Karena DAU bersifat block grant yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar, daerah menyesuaikan pengeluaran mereka mengikuti alokasi DAU, hal tersebut menjelaskan mengapa variabel DAU menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, karena DAU bukan hanya tambahan dana melainkan fondasi utama fiskal daerah. Dalam perspektif Agency Theory, hubungan positif ini mencerminkan berjalannya kontrak keagenan antara pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*). Pemerintah pusat memberikan sumber daya berupa DAU, dan pemerintah daerah meresponsnya dengan melakukan eksekusi belanja untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Signifikansi pengaruh DAU menunjukkan bahwa daerah sangat responsif terhadap "mandat keuangan" yang diberikan oleh principal.

Fakta ini didukung oleh data tren lapangan yang menunjukkan adanya pola linear antara besaran DAU dan Belanja Daerah. Daerah dengan wilayah administratif luas dan jumlah penduduk besar seperti Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang menerima alokasi DAU tertinggi. Sebaliknya kota-kota kecil seperti Kota Mojokerto dan Kota Blitar yang menerima alokasi DAU terendah. Selain itu, dinamika fluktuasi DAU kibat faktor eksternal juga terbukti mempengaruhi belanja. Pada tahun 2020-2021, terjadi penurunan alokasi DAU akibat strategi restrukturisasi fiskal pemerintah pusat sebagai upaya merespons krisis kesehatan global akibat COVID-19. Penurunan transfer ini berdampak langsung pada terkoreksinya realisasi Belanja Daerah di Jawa Timur pada periode yang sama, di mana banyak belanja modal dan barang jasa yang harus ditunda atau dikurangi efisiensinya. Hal ini membuktikan di mana dominasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam menopang pengeluaran daerah masih sangat tinggi. Temuan dalam studi relevan terhadap riset terdahulu. Penelitian (Ayu et al.,

2024), (Somantri, 2024), serta (Astari et al., 2025) yang mengungkapkan bahwa DAU memberikan efek positif signifikan pada belanja daerah dan menjadi alasan utama tingginya ketergantungan fiskal. Penelitian (Wati et al., 2022) juga mengonfirmasi hal serupa, di mana aliran dana dari pusat lebih cepat berubah menjadi belanja dibandingkan sumber dana lainnya. Temuan menunjukkan konsistensi pada (Fitriani et al., 2024) di Provinsi Aceh, bahkan mengungkapkan jika DAU adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan, menandakan betapa dominannya peran DAU dalam struktur APBD daerah di Indonesia.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Merujuk pada Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berdampak positif nyata pada belanja pemerintah di kabupaten dan kota di Jawa Timur, menurut uji sub-hipotesis (uji-t). Hasil tersebut sejalan dengan pola tren DAK di Jawa Timur selama periode 2019-2024 yang cenderung meningkat. Tren ini memperlihatkan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat skema transfer spesifik (*specific grant*) untuk memastikan daerah mampu melaksanakan program pembangunan yang diarahkan secara nasional. Sementara DAU merupakan dana umum, DAK dialokasikan dengan ketentuan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah pusat untuk untuk membiayai program-program prioritas tertentu yang menjadi kewenangan daerah namun tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional (meliputi sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur).. Karena sifatnya yang *earmarked* (sudah ditandai peruntukannya), maka ketika pemerintah daerah menerima alokasi DAK, dana tersebut wajib segera dibelanjakan sesuai petunjuk teknis yang ada. Artinya, penerimaan DAK secara otomatis akan terkonversi menjadi realisasi belanja daerah (khususnya Belanja Modal), sehingga wajar jika pengaruhnya signifikan.

Data pada tabel memperkuat argument ini, terjadi lonjakan alokasi yang signifikan pada tahun 2022 setelah sempat turun di masa awal pandemic. Lonjakan ini berkorelasi langsung dengan peningkatan Belanja Daerah pada tahun yang sama, yang didorong oleh percepatan proyek infrastruktur fisik dan pemulihan ekonomi pasca COVID. Hal ini didukung oleh data tabel 4.6 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Malang menjadi penerima DAK tertinggi, hal ini dikarenakan Kabupaten Malang sebagai yang berperan sebagai zona penyangga bagi destinasi prioritas KSPN Bromo-Tenger-Semeru. Status ini membuat pemerintah pusat memfokuskan DAK Fisik (jalan, pariwisata, sanitasi)

Temuan ini konsisten dengan perspektif Teori Federalisme Fiskal yang mengemukakan bahwa *specific grant* berpotensi memengaruhi belanja daerah karena sifatnya yang mengikat, sehingga meningkatkan insentif pemerintah daerah untuk membelanjakan dana sesuai prioritas pusat. Musgrave dan Oates menegaskan bahwa transfer bersyarat (*conditional grant*) cenderung memicu peningkatan *public spending* pada sektor tertentu karena daerah tidak memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan penggunaannya. Dengan demikian, ketika DAK meningkat, belanja daerah hampir pasti ikut meningkat karena adanya kewajiban pelaksanaan program.

Bukti empiris yang diperoleh dalam riset ini turut mendukung berbagai penelitian terdahulu, (Naraswari, 2023) dan (Lani et al., 2024) di Nusa Tenggara Timur, yang menyimpulkan DAK secara nyata memberikan kontribusi positif yang signifikan

terhadap pengeluaran daerah. Temuan juga mendukung studi (Ayu et al., 2024) yang menempatkan transfer pusat sebagai pendorong belanja modal. Hasil serupa ditemukan oleh (Dewi, 2017) yang menunjukkan bahwa meskipun pengaruh DAK tidak selalu dominan, variabel ini tetap berbanding lurus dengan peningkatan belanja daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Selama periode pengamatan, Dana Untuk Hasil Pendapatan tidak berpengaruh nyata pada alokasi pengeluaran daerah Jawa Timur. Ini ditunjukkan oleh hasil uji parsial (*t*-test). Data tren DBH 2019-2024, Nilai rerata penerimaan DBH menunjukkan pola tidak stabil, dan nominalnya relative lebih kecil dibanding DAU dan DAK. Fluktuasi ini terutama dipengaruhi oleh perubahan bagi hasil pajak pusat (seperti PPh dan PPN) serta bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang mengalami disparitas di seluruh wilayah Jawa Timur. Ketidakmampuan DBH dalam memengaruhi Belanja Daerah secara signifikan juga disebabkan oleh ketimpangan distribusi yang ekstrem antarwilayah di Jawa Timur.

Secara teoristik sifat DBH sangat fluktuatif dan penuh ketidakpastian, realisasi DBH sangat bergantung pada harga komoditas global (seperti harga minyak dunia) dan kebijakan pemerintah pusat, dan bergantung pada karakteristik daerah. Menurut teori federalisme fiskal, *revenue-sharing* seperti DBH memiliki efek yang lebih terbatas dibandingkan *general grant* (DAU) dan *specific grant* (DAK), karena sifatnya tidak dirancang untuk mendorong belanja tertentu, melainkan hanya bersifat pengembalian pendapatan berdasarkan daerah penghasil. dana ini seringkali diperlakukan oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan tambahan yang bersifat fluktuatif (*transitory income*), bukan sebagai pendapatan permanen (*permanent income*) yang bisa diandalkan untuk menopang komitmen belanja jangka panjang. Karena sifatnya yang tidak mengikat dan tidak pasti, respons belanja daerah terhadap perubahan DBH menjadi lemah dan tidak signifikan secara statistik.

Temuan ini mengonfirmasi perspektif Teori Federalisme Fiskal yang menjelaskan bahwa instrumen transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dirancang untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal dengan mengembalikan sebagian penerimaan kepada daerah penghasil (berasal dari pajak dan sumber daya alam). Namun, karena alokasi DBH sangat bergantung pada potensi spesifik masing-masing wilayah, hal ini memicu disparitas penerimaan yang tajam antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Sifat penerimaan DBH yang fluktuatif dan distribusinya yang tidak merata tersebut menjelaskan mengapa variabel DBH terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Berbeda dengan dana alokasi yang bersifat pasti, DBH cenderung diposisikan sebagai penerimaan tambahan yang tidak stabil, sehingga pemerintah daerah tidak dapat menjadikannya fondasi utama dalam merencanakan pengeluaran rutin atau wajib.

Dalam perspektif Teori Agency Theory, ketidaksignifikanan hubungan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah daerah (agent) dalam merespons aliran dana dari pemerintah pusat (principal). Karena realisasi nilai DBH memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (seperti

fluktuasi harga komoditas atau capaian target pajak), agent tidak secara proporsional atau serta-merta mengeksekusi dana tersebut ke dalam pos Belanja Daerah. Ketidakpastian atas besaran "mandat keuangan" berupa DBH ini mendorong daerah untuk bersikap rasional dengan lebih mengandalkan sumber pendapatan yang lebih terukur dan stabil (seperti PAD dan DAU) dalam menjalankan fungsi pelayanannya.

Ketidakmampuan DBH dalam memengaruhi Belanja Daerah secara signifikan juga disebabkan oleh ketimpangan distribusi yang ekstrem antarwilayah di Jawa Timur seperti Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten ini menerima DBH yang sangat besar karena statusnya sebagai daerah penghasil migas utama (blok cepu). Sementara itu, mayoritas daerah lain menerima alokasi DBH yang sangat minim. Ketimpangan antarwilayah ini menyebabkan rata-rata DBH secara keseluruhan tidak cukup dominan untuk memengaruhi pola belanja daerah secara signifikan.

Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan studi-studi terdahulu yang menyatakan bahwa DBH tidak selalu memengaruhi belanja daerah secara signifikan. Fitriani et al., (2024) menyimpulkan bahwa di Provinsi Aceh, belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota tidak terpengaruh secara signifikan oleh Dana Bagi Hasil. Penemuan serupa juga disampaikan (Dewi, 2017) yang menunjukkan bahwa DBH sering kali tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan belanja pemerintah daerah. Dalam konteks Jawa Timur, memberikan bukti bahwa DBH tidak selalu signifikan di wilayah yang PAD-nya besar dan struktur fiskalnya kuat, sehingga tambahan dari DBH tidak menimbulkan perubahan belanja yang berarti.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Mengacu Sumber daya daerah sendiri (PAD) berdampak positif signifikan pada pengeluaran daerah pemerintah Jawa Timur, menurut t-test. PAD memberikan dampak yang dominan, Kondisi tersebut mencerminkan Pemerintah Daerah Jawa Timur memiliki responsivitas yang dominan terhadap kemampuan keuangannya sendiri, hal ini dapat terlihat di data Tren PAD Jawa Timur yang menunjukkan pola pertumbuhan yang meningkat secara stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan pada masa pandemi.

Kota/kabupaten dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, dan Batu memiliki rata-rata PAD yang kuat, sehingga mampu mendorong belanja daerah khususnya belanja publik dan belanja modal. Kenaikan PAD yang stabil hal ini menciptakan fleksibilitas untuk memperluas infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kebebasan finansial. Sebagai pusat perekonomian dengan struktur fiskal yang kuat, Surabaya membuktikan bahwa tingginya kapasitas *own-source revenue* mampu menjadi motor penggerak utama belanja daerah, mengurangi ketergantungan pada fluktuasi dana transfer.

Temuan ini sesuai Teori Federalisme Fiskal dan Desentralisasi Fiskal. Oates (1999) menyatakan bahwa sasaran utama akhir bahwa kebijakan desentralisasi berorientasi pada upaya mendorong terciptanya efisiensi di mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan lokalnya melalui sumber daya lokal. Pengaruh PAD yang signifikan dan dominan menandakan bahwa mekanisme desentralisasi di Jawa Timur

telah berjalan sesuai dengan koridor yang semestinya, di mana daerah tidak lagi bersikap pasif menunggu transfer, melainkan aktif menggali potensi pendapatan sendiri untuk membiayai belanjanya. Temuan dalam studi ini sejalan serta memperkuat hampir seluruh penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, termasuk (Ayu et al., 2024) dan (Astari *et al.*, 2025) menegaskan PAD adalah determinan vital bagi belanja daerah. Hasil studi ini selaras dengan riset (Naraswari Wira & Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, 2023), yang menemukan bahwa respon belanja daerah terhadap PAD sudah relatif seimbang dengan transfer.

Pengaruh Analisis Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

Secara teoretis, Efektif perangkap lalat terjadi ketika pemerintah daerah menanggapi pembayaran transfer (DAU) dengan lebih keras daripada pendapatannya sendiri (PAD). Indikator statistiknya adalah jika Koefisien DAU > Koefisien PAD. Mengacu pada hasil analisis tersebut, terlihat bahwa PAD melampaui DAU ($0.232525 > 0.229675$). Meskipun selisihnya tipis, namun didukung dengan tingkat signifikansi PAD yang jauh lebih kuat (t -hitung 7.22) dibandingkan DAU (t -hitung 2.00).

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa fenomena Flypaper Effect tidak terjadi pada tingkat kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2024. Artinya, pengeluaran daerah di Jawa Timur lebih responsif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana transfer umum (DAU). Hasil ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal mandiri kabupaten/kota di Jawa Timur mulai menunjukkan arah yang positif. Otoritas daerah tidak sepenuhnya bertumpu pada uang transfer dari pusat guna mendanai belanjanya, melainkan mendasarkan keputusan belanjanya pada potensi pendapatan yang mereka miliki. Menurut tinjauan teoritis dalam persepektif Teori Federalisme Fiskal, tidak terjadinya flypaper effect adalah kondisi ideal yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi.

Menurut tinjauan teoritis dalam perspektif Teori Federalisme Fiskal, tidak terjadinya flypaper effect adalah kondisi ideal yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi. Secara konseptual, fenomena flypaper effect yang diibaratkan seperti kertas lengket penangkap lalat terjadi ketika pemerintah daerah cenderung lebih boros atau lebih responsif dalam meningkatkan belanjanya ketika menerima dana transfer dari pusat dibandingkan ketika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, absennya fenomena ini menjadi indikator positif yang mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah telah bertindak rasional dan mencapai tingkat kemandirian finansial yang baik. Otoritas daerah membuktikan kemampuannya dalam mengandalkan kapasitas fiskal internal (PAD) sebagai motor penggerak utama pengeluaran publik, alih-alih hanya bergantung pada stimulus dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Telaah menjadi menarik karena kontradiktif terhadap mayoritas kajian terdahulu seperti (Ayu et al., 2024), (Somantri, 2024), (Astari et al., 2025) menyimpulkan *flypaper effect* terjadi secara masif. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menemukan bahwa daerah masih "bergantung" dan lebih responsif terhadap transfer. Sebaliknya, penelitian ini mendukung temuan (Naraswari Wira & Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, 2023) dan (Firda Armatus Solicha, 2024) yang menelaah belanja

daerah dan tidak menemukan adanya flypaper effect. Kesamaan hasil dengan Naraswari memperkuat argumen bahwa pada periode terkini, khususnya di wilayah dengan ekonomi mapan seperti Jawa, pola ketergantungan fiskal mulai bergeser menuju kemandirian. Hal ini membuktikan bahwa generalisasi *flypaper effect* tidak bisa diterapkan rata di seluruh Indonesia; karakteristik wilayah dan periode waktu (seperti pemulihan pasca-pandemi) memegang peranan kunci dalam mengubah perilaku belanja daerah.

KESIMPULAN

Fokus dari kajian ialah meninjau keberadaan efek perangkap lalat di Provinsi Jawa Timur pada rentang 2019–2022 serta mengkaji pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap pengeluaran daerah. Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut.

DAU meningkatkan pengeluaran regional karena DAU berperan sebagai fondasi utama struktur APBD guna mendanai pengeluaran rutin birokrasi, khususnya untuk alokasi gaji aparatur dan biaya operasional esensial. Peningkatan alokasi DAU secara langsung menyediakan fleksibilitas fiskal bagi otoritas daerah guna menaikkan realisasi belanjanya. Alokasi Pendapatan dari DAK telah terbukti berdampak positif dan signifikan pada pengeluaran regional. Fenomena ini dipicu oleh sifat DAK yang ditentukan penggunaannya dan mengikat sehingga penerimaan DAK mewajibkan pemerintah daerah untuk segera merealisasikannya dalam bentuk belanja program prioritas, khususnya belanja modal dan infrastruktur.

DBH tidak memengaruhi secara signifikan pengeluaran daerah, yang merupakan konsekuensi dari karakteristiknya yang tidak stabil, serta adanya ketimpangan distribusi yang ekstrem antarwilayah. Besar kecilnya PAD memberikan dampak positif nyata terhadap belanja daerah, yang menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Timur memiliki responsivitas tinggi dan semakin mandiri dalam membiayai kebutuhan belanjanya menggunakan potensi pendapatan sendiri. Serta tidak terindikasi Efek perangkap lalat yang terjadi di Jawa Timur periode 2019 sampai 2024 menunjukkan peningkatan kemandirian keuangan provinsi tersebut dan keputusan belanja tidak lagi sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.

Sebagai rekomendasi utama atas tidak terjadinya fenomena flypaper effect, pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan tren kemandirian fiskal dengan terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi. Kemandirian ini perlu diimbangi dengan efisiensi belanja rutin agar ruang fiskal dapat dialihkan secara bertahap pada belanja modal yang produktif, termasuk mengarahkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui skema penganggaran berbasis kinerja dengan indikator output dan outcome yang terukur.

REFERENSI

Astari, A., Sobrotul Imtikhanah, & Muh. Fithrayudi T. (2025). Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan*

- Akuntansi*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1411>
- Ayu, W. T. D. N., Gede, K. D. L., & Gd, N. H. W. I. (2024). Analisis Flypaper Effect dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah: Efek Moderasi Upaya Pajak. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1–19.
- Basuki, D. A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Dewi, S. R. (2017). Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Journal of Accounting Science*, 1(2), 155–174. <https://doi.org/10.21070/jas.v1i2.956>
- Firda Armatus Solicha, N. H. (2024). Analisis FLYPAPER EFFECT Pada Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Daerah di Nusa Tenggara Timur. *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, 4, 126–137.
- Fitriani, Haykal, M., Murhaban, & Indrayani. (2024). Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020-2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(1), 33–46. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Gujarati, D. N. (2009). Basic Econometrics. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach*. Douglas Retner.
- Indonesia, N. R. (2022). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* (Issue 104172).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, D. J. P. (2021). *Kajian Fiskal Regional: Triwulan I 2021*. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2021/21_SULAWESI TENGGARA_TWI_2021.pdf
- Keuangan, D. J. P. (2025). Laporan Perekonomian dan Fiskal Daerah (LPEFD) Triwulan III Tahun 2025. In *Laporan Perekonomian dan Fiskal Daerah (LPEFD) Triwulan III Tahun 2025*.
- Lani, O. Y., Perseveranda, M. E., Manafe, H. A., & Sonbay, Y. Y. (2024). Pengaruh Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah dan dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Privinsi NTT. *Journal of Education Research*, 5(4), 6735–6752. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.2098>
- Masaki, T. (2018). The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*, 106, 173–186. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.026>
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisas Fiskal dan Otonomi di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 150–165.
- Naraswari Wira, P. E., & Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun

- 2019-2021). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 115–125. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i3.68938>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Oates, W. E. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism*. XXXVII(September), 1120–1149.
- Pasaribu, M. (2022). *UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal*. Djpb.Kemenkeu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html#:~:text=Simpulannya,atasDesentralisasi,pinggiran wilayah kesatuan Republik Indonesia.>
- Pramudya, F., & Anis, A. (2024). Analisis Flypaper Effect dan Kemampuan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Somantri, D. A. (2024). Analisis Flypaper Effect dalam Perspektif Keuangan Daerah : Studi Kasus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 653–665.
- Suryani, A. I. (2018). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Periode 2011-2013). *Journal of Accounting Science*, 2(2), 165–179. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i2.2098>
- Tanjung, A. H., Salam, S., Rusdi, J. F., Ermawati, Y., Novianty, I., Hendaris, R. B., & Apriliawati, Y. (2021). Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. *MethodsX*, 8, 101387. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101387>
- Wati, L. N., Ispriyahadi, H., & Zakaria, D. H. (2022). The flypaper effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics*, 40(2), 353–373. <https://doi.org/10.18045/zbefri.2022.2.353>
- Wibowo, A. Y. L., & Widodo, S. (2023). Proporsi Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Serta Menunjukkan Ada Tidaknya Flypaper Effect di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.30742/economie.v5i1.3430>
- Yani Rizal, Safuridar, & Muhammad Ayub Siregar. (2021). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2),

133–145. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4223>